

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEBAGAI PIHAK
KETIGA YANG DIRUGIKAN BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA
TERKAIT HARTA PAILIT YANG MENJADI BARANG RAMPASAN
NEGARA**

(Studi Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017 Pn. Jkt Pst)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**ZIPORA NADYA A. SIREGAR
NIM. 145010101111103**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEBAGAI PIHAK KETIGA
YANG DIRUGIKAN BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA TERKAIT HARTA
PAILIT YANG MENJADI BARANG RAMPASAN NEGARA
(Studi Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017 Pn. Jkt Pst)

ZIPORA NADYA A. SIREGAR
NIM : 145010101111103

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 Oktober 2018 dan disahkan pada tanggal

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M
NIP. 19720622 200501 1002

Shanti Rizkawati, S.H., MKn
NIP. 2012018011216 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 19620805 198802 1001

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M
NIP. 19720622 200501 1002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

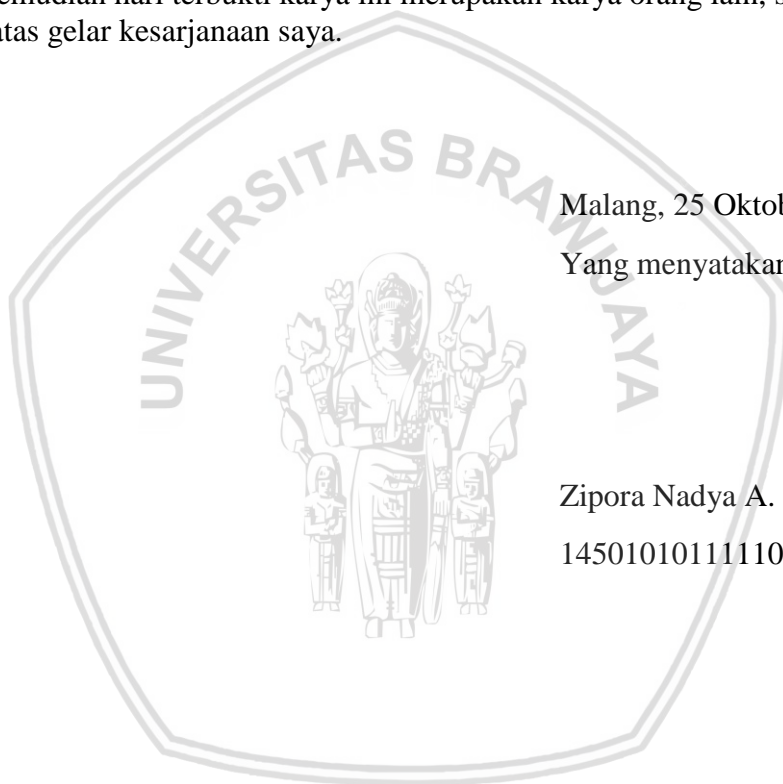
Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 25 Oktober 2018

Yang menyatakan

Zipora Nadya A. Siregar

145010101111103



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan anugrah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh dengan perjuangan yang memberikan pelajaran berharga.

Skripsi sebagai salah satu karya dan merupakan kewajiban setiap mahasiswa yang mana hal ini merupakan suatu kesempatan dan menjadi pengalaman berharga yang penulis dapatkan selama proses pengerjaannya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tentunya mendapatkan dukungan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karuniaNya dalam hidup saya selama ini;
2. Kedua orangtua saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini dan tiada hentinya mengasihi saya;
3. Kakak Rama, Abang Joshua, Abang Muara, dan Abang Budi Joseph yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang berharga serta Steven, Sophia, dan Silva ponakan-ponakan yang selalu memberikan kebahagiaan serta semangat;
4. Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
5. Bapak Budi Santoso, SH., LLM. Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata sekaligus pembimbing saya yang telah sabar mendukung dan membantu selama masa skripsi;
6. Ibu Shanti Rizkawati, SH., M.Kn Selaku Dosen Pembimbing saya yang selalu memberikan arahan dengan sabar serta dukungan kepada saya dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi;
7. Sahabat-sahabat penulis yang selalu ada, memberikan semangat dan doa kepada penulis : Marina Ery, Jessy Theresia, Dewi Marissa, Bimarceline Agatha, Stephanie Cynthia, Agatha Leonie, Ivan Jenni, Santha, Ignesia, Tiarani, Ivana, Vanessa, Inneke, Clarissa, Rahmi Maulidya, Laura Teresia, Churun Ain Nabila, Nenny Sihotang, dan Brenda;
8. Keluarga Deifilii khususnya angkatan 2014;
9. Keluarga Lomba Olimpiade Brawijaya dan Kemenpora EM 2015 yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan pembelajaran untuk menjadi orang yang lebih baik;
10. Teman-teman yang tergabung dalam Tim Juara Mutdjok 2016 yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran berharga khususnya Room 312: Shinta, Andini, Nadiya, Niken, dan Ulfi;

11. Keluarga besar Homeband Fakultas Hukum yang selalu ada untuk berbagi cerita dan perjuangan serta menjadi rumah yang nyaman bagi setiap orang, Pengurus Homeband FH 2017 : Risca, Rafli, Temi, Mahandhani, Adam, Tito, Nando, Jelian, Michael, Firda Shafira, Alwan, Rastra, Irsyad, Ressay, Rizky khususnya Band yang selalu saya banggakan Ultimum Remedium : Rafli Adlana, Marintan Dyaz, Tito, Aryudha, dan Benny.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penulisan skripsi ini, mengingat bahwa kurangnya pengalaman serta pengetahuan dari penulis. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Malang, 27 Agustus 2018

Penulis



repository.ub.ac.id

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS AS THE THIRD PARTY DISADVANTAGED BY CRIMINAL DECISION REGARDING BANKRUPT ASSET EVICTED BY THE STATE

Zipora Nadya A. Siregar, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., Shanti Rizkawati, S.H.,
MKn

Faculty of Law Universitas Brawijaya
ziporasiregar13@gmail.com

ABSTRACT

This research studies the issue over the analysis of legal protection for a disadvantaged creditor as the third party according to Criminal Decision regarding bankrupt asset evicted by the state. This research was initiated based on the case of saving and loan cooperative (hereinafter KSP) Pandawa Mandiri Group in which the legal protection pre-existing and provided for the third party is in conflict with the criminal decision over bankrupt asset convicted by the state. It can be concluded based on the research result that the bankrupt asset is under the ownership of the creditor according to the warranty written in Article 1131 and 1132 of Civil Code Procedure. In other words, although the asset was formerly owned by a debtor, the ownership status can alter to the ownership of the creditor after the issuance of the statement letter on bankrupt asset. Therefore, it is essential to provide legal protection for the third party disadvantaged by the criminal Decision to guarantee the creditor to gain his/her right. Measure taken to defend the advantaged third party due to the Court Decision issued is known as *derde verzet* in a civil law, but in the criminal judicial process in Indonesia, this case is not juridically regulated as in civil law. This situation leads to the absence of regulation that could trigger uncertainty of law towards creditors of KSP of Pandawa Mandiri Group. In this case, *derden verzet* common in civil law can also be applied in criminal court as a form of legal protection for creditors as what occurred in KSP Pandawa Mandiri Group.

Keywords: *legal protection, creditor, bankrupt asset*

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEBAGAI PIHAK
KETIGA YANG DIRUGIKAN BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA
TERKAIT HARTA PAILIT YANG MENJADI BARANG RAMPASAN
NEGARA**

(Studi Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017 Pn. Jkt Pst)

Zipora Nadya A. Siregar, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., Shanti Rizkawati, S.H.,
MKn

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

ziporasiregar13@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan Analisis Perlindungan Hukum Kreditor Sebagai Pihak Ketiga Yang Dirugikan Berdasarkan Putusan Pidana Terkait Harta Pailit Yang Menjadi Barang Rampasan Negara (Studi Putusan Nomor 37/Pdt. Sus-PKPU/2017 Pn. Jkt Pst). Penulisan ini dilatarbelakangi kasus KSP Pandawa Mandiri Group dimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai kreditor saat putusan pernyataan pailit yang terlebih dahulu ada berhadapan dengan suatu putusan pidana terkait harta pailit yang menjadi barang rampasan negara. Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang terjadi bahwa status harta pailit dalam perkara KSP Pandawa Mandiri Group adalah milik kreditor berdasarkan asas jaminan yang tertulis pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara sehingga walaupun hak milik harta tersebut adalah debitor namun setelah adanya Putusan Pernyataan Pailit harta tersebut berganti status menjadi milik para kreditornya. Sehingga dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum kepada para kreditor sebagai pihak ketiga yang dirugikan dengan adanya Putusan perkara Pidana untuk menjamin kreditor mendapatkan haknya. Dalam hukum perdata dikenal adanya *derden verzet* sebagai upaya perlawanan pihak ketiga yang dirugikan dalam suatu Putusan Pengadilan. Namun dalam proses peradilan hukum pidana di Indonesia secara yuridis belum diatur secara khusus seperti pada hukum perdata. Sehingga terdapat kekosongan peraturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para kreditor KSP Pandawa Mandiri Group. Berdasarkan hal itu *derden verzet* yang dikenal dalam hukum perdata

dapat diterapkan juga dalam peradilan perkara pidana sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam kasus yang terjadi pada KSP Pandawa Mandiri Group.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor, Harta Pailit



RINGKASAN

Zipora Nadya A. Siregar, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2018, **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEBAGAI PIHAK KETIGA YANG DIRUGIKAN BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA TERKAIT HARTA PAILIT YANG MENJADI BARANG RAMPASAN NEGARA (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017 Pn. Jkt Pst)**, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., Shanti Rizkawati, S.H., MKn

Pada penelitian ini penulis mengangkat Analisis Perlindungan Hukum Kreditor Sebagai Pihak Ketiga Yang Dirugikan Berdasarkan Putusan Pidana Terkait Harta Pailit Yang Menjadi Barang Rampasan Negara (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017 Pn. Jkt Pst). Penulisan ini dilatar belakangi kasus KSP Pandawa Mandiri Group dimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai kreditor saat putusan pernyataan pailit berhadapan dengan suatu putusan pidana terkait harta pailit yang menjadi barang rampasan negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis status harta pailit dalam perkara KSP Pandawa Group dengan Putusan PKPU Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017pn Pn. Jkt. Pst yang dirampas negara dengan Putusan Pidana Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk ? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi para kreditor yang dirugikan dalam putusan pidana Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk ?

Kemudian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis.

Hasil dari penelitian dengan pilihan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang terjadi bahwa status harta pailit dalam perkara KSP Pandawa Group adalah milik kreditor berdasarkan asas jaminan yang tertulis pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata sehingga walaupun hak milik harta tersebut adalah debitor namun setelah adanya Putusan Pernyataan Pailit harta tersebut berganti status menjadi milik para kreditornya. Sehingga dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum kepada para kreditor sebagai pihak ketiga yang dirugikan dengan adanya Putusan Pidana untuk menjamin kreditor mendapatkan haknya. Dalam hukum perdata dikenal adanya *derden verzet* sebagai upaya perlawanan pihak ketiga yang dirugikan dalam suatu Putusan Pengadilan. Diharapkan dapat pula diterapkan dalam hukum pidana sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bila kasus serupa terjadi di Indonesia.

SUMMARY

Zipora Nadya A. Siregar, Business Civil Law Faculty of Law, University of Brawijaya, October 2018, **ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF CREDITORS AS THIRD PARTIES THAT ARE HARMED BASED ON CRIMINAL DECISIONS REGARDING BANKRUPTCY PROPERTY THAT BECOMES CONFISCATED GOODS OF THE STATE** (Study of Decision Number 37 / Pdt.Sus-PKPU / 2017 Mr. Jkt Pst), Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., Shanti Rizkawati, S.H., MKn

In this study the authors raised the Analysis of Legal Protection of Creditors as Third Parties That Are Harmed Based on Criminal Decisions Regarding Bankruptcy Property That Becomes Confiscated Goods of the State (Study of Decision Number 37 / Pdt.Sus-PKPU / 2017 Mr. Jkt Pst). This writing is based on the case of the Pandawa Mandiri Group KSP where legal protection for a third party as a creditor when a bankruptcy statement is dealt with a criminal decision related to bankrupt assets that are the state's spoils.

Therefore, Based on the above, this research raises the formulation of the problem: (1) How to analyze the status of bankrupt property in the Pandawa Group KSP case with PKPU Decision Number 37 / Pdt.Sus-PKPU / 2017pn Pn. Jkt. Pst, who was seized by the state with a Criminal Decision Number 424 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dpk? (2) What is the legal protection for creditors who have been harmed in a criminal decision Number 424 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dpk?

This study uses a normative juridical method with a statutory approach method (statue approach) and a case approach (case approach). Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using grammatical and systematic interpretation.

The results of the study with the choice of these methods, the authors obtain answers to problems that occur that the status of bankrupt property in the Pandawa Group KSP case belongs to the creditor based on the principle of guarantee written in Article 1131 and 1132 of the Civil Code so that even though the property rights are debtors but after the Decision The statement of bankruptcy of the property changed its status to the property of its creditors. So that in this case there is a need for legal protection to creditors as third parties who are disadvantaged by the existence of a Criminal Decision to guarantee creditors get their rights. In civil law it is known that derden verzet is an attempt to resist third parties who have been harmed in a court decision. It is hoped that it can also be applied in criminal law as a form of legal protection that can provide legal certainty if similar cases occur in Indonesia.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan.....	vi
<i>Summary</i>	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Kepailitan	16
1. Pengertian Kepailitan.....	16
2. Syarat Kepailitan.....	18
3. Pengertian Debitor dan Kreditor.....	19
4. Tujuan Kepailitan	19
5. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit	20
6. Akibat Kepailitan	21
7. Pengaruh Kepailitan Terhadap Pelaksanaan Putusan	25
B. Kajian Tentang Kurator	26
1. Pengertian Kurator	27
2. Persyaratan Kurator	28
3. Asosiasi Kurator	29
4. Tugas Kurator	29
5. Kewenangan Kurator	30
6. Tanggung Jawab Kurator	32
C. Kajian Tentang Penyitaan	33
1. Pengertian Penyitaan.....	33
2. Tujuan Penyitaan	34
3. Prinsip Pokok Sita.....	35
4. Kekuatan Mengikat Sita Sejak Diumumkan.....	37
5. Bentuk-bentuk Sita	37
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	42
1. Pengertian Perlindungan Hukum	42
2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum	44
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	48
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	50
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	51
F. Definisi Konseptual	51

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Status Harta Pailit Dalam Kasus KSP Pandawa Group Berdasarkan Putusan PKPU Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/Pn. Jkt.Pst yang Dirampas Negara Berdasarkan Putusan Pidana Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.....	54
1. Kasus Posisi	54
2. Akibat Putusan Pailit Terhadap Debitor	60
3. Status Harta Pailit Dalam Kasus KSP Pandawa	66
B. Analisis Perlindungan Hukum Kreditor Yang Dirugikan Dalam Putusan Pidana Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.....	71
1.1. Kerugian Kreditor Akibat Putusan Pidana.....	71
1.2. Perlindungan Hukum Kreditor Sebagai Pihak Ketiga Yang Dirugikan.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Penulisan Terdahulu	12
---------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memerlukan uang atau dana untuk membiayai kehidupannya. Demikian juga dengan suatu badan hukum, terutama perusahaan untuk membiayai kegiatan bisnisnya. Sebelum manusia mengenal alat pembayaran berupa uang, manusia mendapatkan apa yang dibutuhkannya untuk hidup dari alam dengan berbagai cara seperti berburu, bercocok tanam, menambang, atau membuat sesuatu dengan bahan-bahan yang diperoleh dari alam. Namun apabila terdapat kebutuhan yang tidak segera didapatkan dari alam maka manusia melakukan barter dengan cara menukarkan barang yang dimilikinya untuk suatu barang yang dibutuhkannya dari orang lain. Setelah manusia mengenal alat pembayaran berupa uang, ia tidak lagi melakukan barter sebagai cara mendapatkan kebutuhannya, melainkan memperoleh uang sebagai alat pembayaran bagi segala hal yang dibutuhkannya untuk hidup.

Dalam kehidupan, baik orang perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, orang atau perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkannya itu dari pihak lain.¹ Banyak badan hukum dan perusahaan yang beroperasi sebagian besar karena adanya pinjaman dari pihak lain terutama Bank.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, **Hukum Kepailitan: memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 2

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi gejolak moneter di beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia. Krisis moneter tersebut berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS. Hal itu mengakibatkan utang-utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap para kreditor luar negeri, menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali debitor Indonesia tidak mampu membayar utang-utangnya.² Di samping itu, kredit macet di perbankan dalam negeri juga makin membumbung tinggi secara luar biasa sebelum adanya krisis tersebut, perbankan Indonesia memang telah menghadapi masalah kredit bermasalah atau *Non-Performing Loans* yang memprihatinkan, yaitu sebagai akibat terpuruknya sektor riil. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan krisis tersebut masyarakat mengharapkan adanya sarana yang dapat digunakan untuk menagih tagihannya dengan efektif. Untuk maksud tersebut, hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dianggap mampu menyelesaikan masalah penyelesaian hutang piutang dengan cara yang lebih modern dan selaras dengan pembangunan ekonomi nasional dan globalisasi di Indonesia.³

Krisis moneter yang terjadi membuat masyarakat yang menjadi pelaku usaha di Indonesia mulai merasakan bahwa peraturan kepailitan yang ada pada saat itu yaitu *Faillissementsverordening*, tidak lagi dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan krisis yang terjadi. Mengingat upaya restrukturisasi utang masih belum dapat diharapkan pada saat itu karena banyak debitor yang sulit dihubungi oleh para kreditornya karena berusaha mengelak untuk bertanggungjawab atas penyelesaian utang-utangnya, sedangkan upaya melalui

² *Ibid.*, hlm. 22

³ Zainal Asidikin, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia**, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 20

kepailitan dengan menggunakan *Faillissementsverordening* yang berlaku sangat lambat prosesnya dan tidak dapat pula dipastikan hasilnya, maka masyarakat kreditor, terutama masyarakat kreditor luar negeri, menghendaki agar peraturan kepailitan Indonesia, yaitu *Faillissementsverordening* secepatnya dapat diganti atau diubah. IMF sebagai pemberi utang kepada pemerintah Republik Indonesia berpendapat pula bahwa upaya mengatasi krisis moneter di Indonesia tidak dapat terlepas dari keharusan penyelesaian utang-utang luar negeri para pengusaha Indonesia dan upaya penyelesaian kredit-kredit macet perbankan Indonesia. Kemudian IMF akhirnya mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk mengganti atau mengubah peraturan kepailitan yang berlaku yaitu *Faillissementsverordening*, sebagai sarana untuk penyelesaian utang-utang pengusaha Indonesia kepada para kreditornya. Sehingga pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Pada tanggal 9 September 1998 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan itu ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Kemudian Pemerintah berhasil membuat RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi Undang-Undang karena dianggap perlu untuk mengganti substansi pada Undang-Undang sebelumnya agar menjadi relevan dengan perkembangan dunia ekonomi sehingga diundangkanlah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UU KPKPU) yang berlaku hingga sekarang. Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai

cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang.⁴

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat 3 tujuan pembentukan Undang-Undang kepailitan yaitu, pertama untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor, kedua untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya, dan ketiga untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

Hukum kepailitan memiliki beberapa asas umum. Asas umum hukum kepailitan Indonesia diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang disebut dengan prinsip kesamaan kedudukan kreditor (*Paritas Creditorium*) dan Pasal 1132 KUH Perdata yang disebut dengan prinsip *pari passu prorata parte*, yaitu semua kreditor mempunyai hak yang sama atas harta Debitor, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.⁵ Sebagaimana hukum perdata mengatur bahwa harta debitor menjadi jaminan untuk segala perikatan yang dimilikinya, maka harta debitor tersebut menjadi hak para kreditor-kreditornya. Kreditor dalam hukum kepailitan terbagi dalam beberapa jenis kreditor, yaitu kreditor separatis (*secured creditor*), kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat melakukan eksekusi seolah tidak terjadi kepailitan dan merupakan kreditor yang paling tinggi kedudukannya

⁴ Sri Redjeki Hartono, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 11

⁵ Syamsudin M. Sinaga, **Hukum Kepailitan Indonesia**, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm.

dibandingkan kreditor lainnya, Kemudian kreditor preferen adalah kreditor yang didahulukan pembayarannya atas semua harta pailit berdasarkan sifat piutangnya. Selanjutnya kreditor konkuren adalah kreditor yang memiliki piutang tanpa ikatan tertentu. Mereka bersama-sama akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata.⁶

Sebagaimana ditulis dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Putusan pernyataan pailit tersebut mengakibatkan seorang debitor menjadi tidak cakap dalam menguasai dan mengurus kekayaannya. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sehingga sejak putusan pailit diucapkan, maka seluruh kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat itu maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan bagi seluruh utang debitor sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, dan berada dibawah kewenangan kurator sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan.

Setelah adanya putusan pernyataan pailit dan adanya keadaan insolvensi maka kurator dapat melaksanakan tugas pemberesan harta pailit. Dalam putusan

⁶ *Ibid.*, hlm 17

pernyataan kepailitan, selain dapat menetapkan debitur dalam keadaan pailit, hakim juga dapat menetapkan kurator tetap dan hakim pengawas sepanjang diminta oleh debitur atau kreditor.⁷ Pengertian kurator menurut Pasal 1 angka 5 UU KPKPU adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas. Lebih lanjut, dalam Pasal 70 UU KPKPU dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kurator ialah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.⁸

Kurator memiliki wewenang dalam penyelesaian suatu proses kepailitan. Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menjalankan tugasnya. Wewenang selalu terkait dengan tugas (kewajiban) yang dibebankan terhadap seseorang.⁹ Kurator secara umum berwenang melaksanakan tugas dan pemberesan harta pailit, sering menemui kendala-kendala yang berpengaruh pada tidak efektifnya suatu proses kepailitan. Pengaruh tersebut terdapat pada lamanya durasi waktu penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta pailit yang mana dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara kepailitan, baik bagi para kreditor maupun debitor. Ketidakpastian tersebut dapat berimbas pada keberlangsungan kepentingan usaha para kreditor maupun kepentingan debitor untuk melanjutkan mata pencahariannya.

⁷ H. Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, **Hukum Perusahaan & Hukum Kepailitan**, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 219

⁸ Imran Nating, **Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 60

⁹ Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 147

Pada saat proses kepailitan berlangsung sebelum maupun sesudah adanya putusan pailit, terdapat kemungkinan bahwa debitor terlibat suatu perkara dengan pihak lain, dapat berupa suatu perkara perdata lainnya maupun perkara pidana. Mungkin pula pada perkara tersebut menimbulkan adanya suatu penetapan sita atas harta debitor. Maka atas kemungkinan tersebut Undang-Undang Kepailitan telah mengatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) bahwa dengan adanya putusan kepailitan, maka penyitaan dan upaya hukum atas penyitaan itu harus dihentikan, dan semua penyitaan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Karena dengan adanya putusan kepailitan maka seluruh sita yang ada pada sebuah benda yang menjadi harta pailit digantikan dengan sita umum kepailitan. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi harta debitor pailit dari segala kemungkinan kecurangan dan perbuatan yang dapat merugikan harta pailit yang dapat dilakukan oleh kreditor maupun debitor. Namun dalam praktiknya harta pailit yang telah disita umum dan telah diurus dan/atau dibereskan oleh kurator ternyata dapat diambil alih oleh penyidik untuk disita pidana.¹⁰

Setelah melalui tahap penyitaan yang dalam Pasal 1 angka 16 KUHP didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Namun apabila perkara berlanjut dan sampai kepada tahap perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam

¹⁰ Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016, Siti Hapsah Isfardiyana, **Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit**, hlm. 630

putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih sebagai barang bukti dalam perkara lain.¹¹

Seiring berkembangnya dunia bisnis pada tahun 2017 terdapat kasus investasi Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group saat ini menimbulkan polemik pada masyarakat dan praktisi hukum. KSP Pandawa group telah dinyatakan pailit dengan putusan Pailit PKPU Nomor 37/PDT.SUS-PKPU/2017/PN Pn. Jkt. Pst yang memiliki kreditor konkuren yang berjumlah massal. Namun setelah putusan pernyataan pailit tersebut berkekuatan hukum tetap, diduga terdapat tindak pidana khusus perbankan yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group. Sehingga jaksa menyita benda atau aset yang diduga hasil dari tindak pidana tersebut menjadi barang bukti lalu berdasarkan amar Putusan Pidana Nomor 424/Pid/Sus/2017/PN. Dpk barang bukti itu dirampas negara. Benda-benda yang menjadi barang rampasan negara itu merupakan benda-benda yang telah menjadi harta pailit dari debitor pailit yaitu KSP Pandawa Mandiri Group, dimana pada benda yang disita tersebut telah menjadi jaminan bagi para kreditor berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Sehingga dengan adanya keadaan insolvensi dan sebelum adanya Putusan Pidana tersebut maka kurator berhak melakukan tugas pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit untuk dibagikan kepada para kreditor yang dalam perkara ini bersifat kreditor konkuren. Namun dengan adanya Putusan Pidana terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh KSP Pandawa Mandiri

¹¹ *Ibid.*

Group menimbulkan polemik serta ketidakpastian hukum pada 560.000 ribu korban dan kurator yang menjadi pengurus kepailitan KSP Pandawa.¹²

Keadaan demikian jelas merugikan bagi para kreditor konkuren dari KSP Pandawa Mandiri Group. Dalam hal ini kreditor harus mendapat perlindungan hukum agar putusan pernyataan pailit yang telah ada dapat dilaksanakan dan mengembalikan hak para kreditor yang berjumlah massal. Namun saat ini ketika kasus serupa terjadi, belum terdapat suatu penyelesaian yang efektif terkait perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Dalam hukum perdata apabila pihak ketiga dirugikan dalam suatu putusan maka dikenal upaya perlawanan pihak ketiga yang disebut *derden verzet*. Dalam hal ini, menurut kurator bahwa Putusan Pidana tersebut tidak mempertimbangkan putusan kepailitan yang telah ada sebelumnya, dimana sebagian besar barang bukti yang menjadi barang rampasan negara tersebut adalah harta pailit untuk dibagikan kepada masyarakat yang menjadi kreditornya.

Dibawah ini adalah tabel yang akan menggambarkan mengenai penulisan terdahulu yang berkorelasi dengan harta pailit yang menjadi barang rampasan negara.

Tabel 1.1
Penulisan Terdahulu

Nomor	Nama Penulis	Instansi	Judul Penulisan	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Oktaviani F. Tambunan	Universitas Sebelas Maret	Penyitaan Benda dalam Kepailitan oleh Kurator dan Penyitaan	1. Bagaimanakah kewenangan kurator dan penyidik	Penelitian terdahulu membahas mengenai kewenangan

¹²<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/12/11/pengadilan-vonis-bos-ksp-pandawa-15-tahun-penjara-dan-denda-rp-200-miliar> diakses pada tanggal 10 April 2018, pukul 15.25.

			Benda oleh Kepolisian dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan MA Nomor 156 K/PDT.SUS-PAILIT/2015)	<p>dalam melakukan penyitaan terhadap harta debitor?</p> <p>2. Apakah kurator dapat melakukan penyitaan terhadap harta pailit yang telah disita dalam perkara pidana?</p>	<p>kurator dan penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap harta debitor sedang dalam penulisan ini penulis membahas analisis status harta pailit dalam perkara KSP Pandawa Group dengan Putusan PKPU dan Putusan Pidana terkait amar putusan pidana harta pailit yang dirampas untuk negara. Penelitian terdahulu membahas apakah kurator dapat melakukan penyitaan terhadap harta pailit yang disita dalam perkara pidana sedang penulis membahas perlindungan hukum bagi kreditor yang dirugikan atas suatu putusan pidana.</p>
2.	Astri Y.	Universitas Atma Jaya	Tinjauan Yuridis atas Kewenangan Kurator terhadap Sita Pidana yang terdapat dalam Harta Pailit.	1. Bagaimana kewenangan kurator terhadap sita pidana yang terdapat dalam harta (boedel) pailit menurut Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan	Penulisan terdahulu membahas kewenangan kurator dalam sita pidana sedang penulis dalam penulisan ini membahas analisis status harta pailit dalam perkara KSP Pandawa Group dengan Putusan PKPU dan Putusan Pidana terkait amar putusan pidana harta pailit yang

				Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? 2. Bagaimana kedudukan hukum dari sita pidana yang terdapat dalam harta (boedel) pailit ?	dirampas untuk negara. Penelitian terdahulu membahas kedudukan sita pidana dalam harta pailit sedang penulis membahas perlindungan hukum bagi kreditor yang dirugikan atas suatu putusan pidana.
--	--	--	--	--	---

Dalam hal melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator tidaklah mudah untuk dilakukan, mengingat banyaknya hambatan dan kepentingan berbagai pihak didalamnya. Hal itu mengakibatkan proses kepailitan menjadi terhambat karena harta pailit sulit untuk diberesan sehingga merugikan kreditor sebagai pihak ketiga dalam Putusan Pidana tersebut, sehingga dibutuhkan analisis peraturan mengenai harta pailit yang menjadi barang rampasan negara. Untuk itu penulis beranggapan bahwa perlu adanya suatu penulisan yuridis normatif dengan mengangkat judul Analisis Perlindungan Hukum Kreditor Sebagai Pihak Ketiga Yang Dirugikan Berdasarkan Putusan Pidana Terkait Harta Pailit Yang Menjadi Barang Rampasan Negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status harta pailit dalam perkara KSP Pandawa Group dalam Putusan PKPU Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/pn Pn. Jkt. Pst yang dirampas negara berdasarkan Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk ?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para kreditor yang dirugikan dalam Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis status harta pailit dalam perkara KSP Pandawa Group dalam putusan PKPU Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/pn Pn. Jkt. Pst yang dirampas negara berdasarkan Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para kreditor yang dirugikan dalam putusan pidana Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.

D. Manfaat Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang telah diteliti oleh penulis, maka penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan lebih dalam sebagai pengembangan pemikiran ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum kepailitan, sebagai suatu petunjuk dalam penegakkan hukum kepailitan.
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan materi untuk kajian dan perbendaharaan karya ilmiah di bidang hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Hasil penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum kreditor sebagai pihak ketiga yang dirugikan

berdasarkan putusan pidana terkait harta pailit yang menjadi barang rampasan negara.

b. Bagi Kurator

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu para kurator untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum kreditor sebagai pihak ketiga yang dirugikan berdasarkan putusan pidana terkait harta pailit tersebut menjadi rampasan negara.

c. Bagi Kejaksaan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan sudut pandang mengenai kedudukan sita umum dengan sita pidana dan dapat memahami peraturan mengenai perlindungan hukum kreditor sebagai pihak ketiga yang dirugikan berdasarkan putusan pidana terkait harta pailit tersebut menjadi rampasan negara.

d. Bagi Masyarakat sebagai kreditor

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pandangan serta informasi untuk membantu masyarakat sebagai kreditor dalam mengatasi masalah kepailitan apabila dirugikan sebagai pihak ketiga dalam suatu perkara pidana.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang penulisan yang akan dilakukan secara keseluruhan oleh penulisan dalam skripsi ini, Penulis membuat sistematika yang terdiri dari 5 bab dan masing-masing bab memiliki substansi

yang berbeda namun menjadi suatu kesatuan yang saling berhubungan. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pengantar yang didalamnya terdapat uraian mengenai latar belakang masalah yaitu landasan yang mendasari penulis untuk melakukan penulisan ini, perumusan masalah berisi tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang membahas mengenai berbagai uraian tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan kasus yang dibahas.

BAB III : METODE PENULISAN

Bab ini merupakan bab yang membahas mengenai metode-metode yang dilakukan guna memenuhi data penulisan yang diperlukan, antara lain Jenis Penulisan, Pendekatan Penulisan, Jenis dan Sumber Data yang digunakan, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data dan Definisi Konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengkaji mengenai analisa status harta pailit dalam perkara KSP Pandawa Group dalam Putusan PKPU Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/pn Pn. Jkt. Pst yang dirampas negara berdasarkan Putusan Nomor

424/Pid.Sus/2017/PN. Dpk serta membahas mengenai perlindungan hukum bagi para kreditor yang dirugikan dalam Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan kesimpulan penulis terhadap penulisan ini dan berbagai saran penulis mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Pengertian kepailitan terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU KPKPU yaitu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Terdapat pula beragam pengertian yang diberikan sarjana hukum yang berbeda-beda dengan berbagai sudut pandang yang pada dasarnya mempunyai suatu tujuan yang sama.

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedinio: “Pailit adalah keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku *curatrice* (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor”.¹

Selanjutnya menurut Henry Campbell Black: “*Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or became due*”.² Dari pendapat Black, bisa dilihat bahwa pengertian bangkrut/pailit dikaitkan dengan “ketidakmampuan” untuk membayar. Bukan “ketidakmauan” untuk membayar dari Debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.³

Lebih komprehensif, Jerry Hoff menggambarkan kepailitan sebagai : “*Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the*

¹ Subekti dan R. Tjitrosoedinio, **Kamus Hukum**, Pradya Pramita, Jakarta, 1978, hlm. 89

² Henry Campbell Black, **Black's Law Dictionary Sixth edition**, West Publishing Co., St. Paul, 1990, hlm. 147

³ Syamsudin Sinaga, **Hukum Kepailitan Indonesia**, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 5

*assets. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardianship. A company also continues to exist after the declaration of bankruptcy. During the bankruptcy proceedings, acts with regard to the bankruptcy estate can only be performed by the receiver, but other acts remain part of the domain of the debtor's corporate organs.*⁴ Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemungkinan ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).⁵

2. Syarat Kepailitan

Sangat penting untuk diketahui terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar permohonan pernyataan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁴ Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, 1990, hlm. 11

⁵ Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Dalam: Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 55-56

- 1) Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor (*concursum creditorum*); atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor. Apabila seorang debitor hanya memiliki satu orang kreditor, maka eksistensi dari UU KPKPU kehilangan *raison d'être*-nya. Apabila debitor yang hanya memiliki seorang kreditor dibolehkan pengajuan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitor yang menyatakan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaannya.⁶
- 2) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
- 3) Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

3. Pengertian Debitor dan Kreditor

Pengertian debitor menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah “orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa debitor berhak mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri atau disebut dengan *voluntary petition*. Ketentuan bahwa debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut oleh banyak negara sehingga hal ini merupakan ketentuan yang lazim. Ketentuan itu yang kemudian membuka

⁶ Sutan remy, *Op. Cit.*, hlm. 53

kemungkinan bagi debitor yang nakal unruk melakukan rekayasa demi kepentingan dan keuntungannya.

Pengertian kreditor menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah “orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atas Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

4. Tujuan Kepailitan

Tujuan kepailitan adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitor yaitu segala harta benda debitor disita atau dibekukan untuk kepentingan semua kreditornya secara seimbang. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Jordan dari buku *The Early History of Bankruptcy Law*, tujuan dari hukum kepailitan adalah:⁷

- 1) Menjamin pembagian yang sama terhadap kekayaan debitor diantara para kreditornya.
- 2) Mencegah agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
- 3) Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

5. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:⁸

- 1) Orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan

⁷ Adrian Sutedi, **Hukum Kepailitan**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 29

⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis: Kepailitan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 16

yang telah menikah maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta.

- 2) Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang.
- 3) Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai ketentuan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya.
- 4) Harta peninggalan. Undang-Undang kepailitan juga memungkinkan dipailitkannya harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia jika ada seorang kreditor atau lebih yang mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat menunjukkan bahwa orang yang meninggal itu telah berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.

6. Akibat Kepailitan

- 1) Akibat putusan pailit bagi debitor

Dalam Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU disebutkan secara jelas bahwa, dengan adanya putusan pernyataan pailit debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk ke dalam kepailitan dan hak untuk mengurus kekayaannya terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum, kecuali harta yang termauk ke dalam Pasal 22 UU KPKPU.

Ketentuan pengecualian harta yang dimasukkan dalam harta pailit tersebut harus dibaca sepanjang debitor pailitnya adalah orang dan bukan badan hukum. Jika si pailit adalah sebuah

perseroan terbatas maka pengecualian harta pailit ini tidak dapat diterapkan, bahkan gaji seorang debitor perseroan terbatas malah menjadi utang harta pailit yang harus dibayar kepada direktur tersebut.⁹

Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, maka :

- a) Seluruh harta kekayaan debitor pailit berada dalam sita umum, kecuali yang tidak termasuk dalam harta pailit tidak disita, yang termasuk harta pailit adalah harta debitor yang sudah ada dan yang akan ada selama kepailitan berlangsung, misalnya warisan, pembayaran piutang debitor sebagai kreditor, hibah dan lainnya.
- b) Semua sita baik jika jaminan (Conservatoir Beslag), sita revindikator (revindicatoire Beslag), sita eksekusi (executorial beslag) yang sebelumnya sudah dilakukan sudah tidak berlaku lagi.
- c) Semua eksekusi yang baru dimulai juga dihentikan, eksekusi yang telah selesai dilanjutkan sampai tuntas, hasilnya tetap di luar harta pailit, jika hari lelang telah ditentukan atas kuasa Hakim Pengawas, kurator tetap dapat melaksanakan eksekusi lelang, dimana hasil lelang masuk dalam harta pailit.
- d) Semua perkara perdata dalam bidang harta kekayaan baik debitor sebagai penggugat maupun tergugat diambil alih oleh kurator. Semua kewenangan debitor berpindah pada kurator.
- e) Debitor pailit terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat menjadi tidak cakap untuk berbuat terhadap harta kekayaannya, debitor tidak dapat menjual, menghibahkan, atau memindahtangankan harta kekayaannya. Sedangkan

⁹ Hadi. M, **Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan**, Putra Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 38

utang-utang baru yang dibuat oleh debitor tidak lagi dijamin oleh harta kekayaannya kecuali ada keuntungannya bagi harta pailit.¹⁰

2) Akibat putusan pailit bagi kreditor

Pada dasarnya, para kreditor mempunyai kedudukan yang sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak eksekusi harta kepailitan sesuai dengan besar tagihan masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun atas demikian mengenal pengecualian yaitu terhadap kreditor yang memegang hak jaminan atas kebendaan dan terhadap golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang kepailitan.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU KPKPU, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. Selanjutnya, kreditor dapat digolongkan sesuai tingkatan kedudukan dalam perkara kepailitan menjadi:

a) Kreditor Separatis

Merupakan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (meliputi: pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek) yang dapat bertindak sendiri. Hak penting yang dimiliki kreditor separatis adalah hak untuk menjual/mengeksekusi sendiri objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*).¹¹

b) Kreditor Preferen

Merupakan kreditor yang semata-mata karena sifat utangnya mendapatkan pelunasan terlebih dahulu oleh Undang-Undang. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Salah satu contohnya adalah utang pajak yang terdapat di dalam Pasal 21

¹⁰ Eliyana, **Makalah: Kapita Selekta Hukum Ekonomi Bisnis**, 2003, hlm. 7

¹¹ Kartini Muljadi, **Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan**, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 168

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 1137 KUH Perdata, dan untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.¹²

c) Kreditor Konkuren

Merupakan Kreditor dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan. Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata.¹³

3) Akibat Putusan Pailit bagi Pihak Ketiga

a) Bagi Pekerja

Terhadap buruh yang upahnya belum dibayarkan dalam kasus kepailitan maka bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayarkan lebih dahulu daripada utang-utang lainnya (penjelasan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Namun, kedudukan tagihan upah buruh tetap tidak dapat lebih tinggi dari kedudukan piutang kreditor separatis.

b) Bagi Penyidik

Dengan adanya putusan pailit maka harta debitor berada dalam sita umum sehingga segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan dibatalkan demi

¹² *Ibid.*, hlm. 165

¹³ *Ibid.*, hlm. 164-165

hukum. Namun, penyitaan pidana atas sita umum pailit dapat terjadi apabila sebagian harta pailit diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang. Dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan perkara pidana. Berpedoman dengan Pasal 39 ayat (2) KUHAP penyidik melakukan penyitaan pidana untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan.

7. Pengaruh Kepailitan Terhadap Pelaksanaan Putusan

Sejak putusan pernyataan kepailitan ditetapkan, maka eksekusi putusan hakim lainnya yaitu segala putusan hakim yang menyangkut harta kekayaan debitor pailit harus dihentikan, demikian pula dengan penyitaan yang dilakukan harus dibatalkan demi hukum. Pasal 31 UU KPKPU menegaskan bahwa putusan pernyataan pailit akan membawa akibat segala putusan hakim yang menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitor yang telah diadakan sebelum diputuskan pernyataan pailit harus segera dihentikan, sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman paksaan badan yang dapat dilaksanakan. Segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan dibatalkan demi hukum. Bila dianggap perlu, Hakim Pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan.¹⁴

B. Kajian Tentang Kurator

1. Pengertian Kurator

Pengertian kurator dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UUK diartikan sebagai Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan

¹⁴ Rachmadi Usman, **Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 53

membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan. Pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.

Kurator tersebut harus diangkat oleh Pengadilan atas permohonan debitor atau kreditor. Akan tetapi kreditor atau debitor tidak mengajukan permohonan pengangkatan kurator, maka Balai Harta Peninggalan (BPH) yang bertindak sebagai kurator.¹⁵

2. Persyaratan Kurator

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UU KPKPU menambahkan persyaratan bahwa seorang kurator lainnya harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor dan kreditor. Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak mempunyai kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor yang dalam prakteknya seorang kurator adalah sebagai pihak yang tidak memihak.

Syarat pendaftaran kurator dan pengurus menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.05.10 Tahun 2005:¹⁶

- 1) Kurator adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia.
- 2) Kurator haruslah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya adalah kurator seorang yang beragama.

¹⁵ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 53

¹⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

- 3) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ditujukan untuk menghindari kurator seorang yang beritikad tidak baik (di luar aturan maupun kehendak negara RI).
- 4) Kurator adalah seorang Sarjana Hukum (SH) atau Sarjana Ekonomi (SE) jurusan akuntansi. Namun dalam hal ini meskipun kurator seorang sarjana hukum, sebagai seorang yang profesional ia dituntut tidak hanya menguasai kepailitan dari bidang hukum melainkan juga menguasai dari bidang akuntansi. Begitu pula sebaliknya, jika kurator adalah seorang Sarjana Ekonomi (SE), ia dituntut tidak hanya menguasai kepailitan dari bidang akuntansi melainkan juga harus menguasai dari bidang hukumnya.
- 5) Telah mengikuti pelatihan calon kurator dan pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus yang bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI.
- 6) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 7) Kurator adalah seorang yang tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
- 8) Membayar biaya pendaftaran yang telah ditentukan.
- 9) Harus memiliki keahlian khusus, maksudnya telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan kurator dan pengurus.

3. Asosiasi Kurator

Disadari bahwa profesi kurator dan pengurus adalah profesi yang baru sehingga keberadaan organisasi bagi para kurator merupakan hal yang sangat dibutuhkan sebagai suatu wadah atau organisasi yang mempunyai tujuan, kode etik dalam menjalani profesi kurator.

Untuk dapat menjadi kurator, diharuskan untuk mengikuti pendidikan profesi kurator yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi kurator yang dapat diikuti oleh Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Akuntansi. Apabila pendidikan profesi advokat diselenggarakan oleh Peradi, maka pendidikan profesi kurator diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Selain AKPI, asosiasi profesi kurator lainnya seperti Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) juga mengadakan pendidikan profesi kurator.

4. Tugas Kurator

Pada Pasal 69 UU KPKPU tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Secara garis besar, tugas kurator dapat dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan, yaitu:

1) Tahap Pengurusan

- a) Mendata dan melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Verifikasi dari kewajiban debitor pailit memerlukan ketelitian dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.
- b) Mendata melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan yang dimaksud.¹⁷

2) Tahap Pemberesan

¹⁷ Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 73

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan dimuka umum atau apabila di bawah tangan, dengan persetujuan Hakim Pengawas. Setelah dilakukan pemberesan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembagian. Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian.

5. Kewenangan Kurator

Beberapa hal yang menjadi kewenangan kurator menurut UU KPKPU adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat (3) UU KPKPU).
- 2) Kurator dapat menghadap pengadilan dengan seizin Hakim Pengawas kecuali untuk hal-hal yang disebut dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3) UU KPKPU yang tidak memerlukan izin Hakim Pengawas (Pasal 69 ayat (2) dan ayat (5) UU PKPU); menjadi penggugat atau tergugat berkenaan dengan gugatan yang berhubungan dengan harta pailit (Pasal 26 ayat (1) UU KPKPU); mengambil alih perkara yang sedang berjalan (Pasal 228 UU PKPU).
- 3) Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 UU KPKPU (perjanjian timbal balik). Dalam hal ini pada saat putusan pernyataan ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru dipenuhi sebagian, maka pihak dengan siapanyang belum atau baru dipenuhi sebagian, maka pihak dengan siapa yang belum atau baru dipenuhi sebagian, maka pihak

¹⁸ Jono, *Op. Cit.*, hlm. 147

dengan siapa debitor mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.

- 4) Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditor separatis setelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 ayat (2) UU PKPU), atau kurator menjualnya dalam jangka waktu (pasal 56 ayat (3) UU PKPU), ataupun membebaskan barang agunan dengan membayar kepada kreditor jumlah terkecil antara harga pasar dan jumlah hutang yang dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3) UU PKPU).
- 5) Kewenangan untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit (atas persetujuan panitia kreditor atau Hakim Pengawas jika tidak ada panitia kreditor), walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali (Pasal 104 ayat (1) UU KPKPU).
- 6) Kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan Hakim Pengawas) Pasal 107 UU KPKPU.
- 7) Kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pihak kreditor atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, gadai dan hak agunan lainnya (Pasal 57 ayat (2) UU KPKPU).
- 8) Kurator dapat menghentikan ikatan sewa-menyewa (Pasal 38 UU KPKPU). Perjanjian sewa-menyewa yang dapat dihentikan, karena debitor dinyatakan pailit adalah jika debitor pailit tersebut menyewa suatu barang dari pihak lain. Dalam hal ini kurator maupun pihak yang menyewakan barangnya sama-sama dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa tersebut.
- 9) Kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan (Pasal 39 UU KPKPU).

- 10) Kurator dapat menerima warisan untuk debitor dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan (Pasal 40 ayat (1) UU KPKPU). Kurator dapat juga menolak warisan dengan kuasa dari Hakim Pengawas (Pasal 40 ayat (2) UU PKPU).
- 11) Kurator berwenang untuk menyimpan barang berharga milik debitor dengan cara yang paling aman, misalnya emas, berlian, surat berharga disimpan kurator dalam safe deposit pada bank, akan tetapi Hakim Pengawas berwenang pula untuk menentukan cara-cara penyimpanan oleh kurator tersebut (Pasal 108 UU KPKPU).

6. Tanggung Jawab Kurator

Ketentuan UU KPKPU mengatur begitu banyak tugas dan wewenang seorang kurator, maka beban tanggung jawab yang diembannya juga semakin berat, untuk itu dituntut kehati-hatian serta kecermatan yang tinggi dalam menjalankan tugas tersebut. Sikap kurang hati-hatian dapat berakibat kerugian bagi pihak yang terkait, sehingga para pihak tersebut dimungkinkan dapat saja mengajukan tuntutan atas kerugiannya. Terkait dengan tanggung jawab kurator, dalam Pasal 72 UU KPKPU menyatakan bahwa kurator harus bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurusan dan/atau penyelesaian yang menyebabkan kerusakan/kerugian pada kekayaan kepailitan.¹⁹

Seorang kurator dapat saja dituntut secara perdata oleh debitor/kreditor bila debitor/kreditor mengalami kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan/kelalaian kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, dengan catatan debitor/kreditor harus dapat membuktikan kesalahan/kelalaian kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta kepailitannya. Kurator harus menjaga keutuhan dan keselamatan harta pailit serta dianjurkan pula agar mengusahakan untuk meningkatkan nilai harta pailit. Segala kerugian

¹⁹ Rachamdi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 78

yang timbul sebagai akibat dari kelalaian/ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator.

C. Kajian Tentang Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan

Pengertian penyitaan menurut Yahya Harahap adalah sebagai berikut:²⁰

- a) Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan;
- b) Tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah Pengadilan atau Hakim;
- c) Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan atau barang yang dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan hutang debitor/tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang akan disita;
- d) Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan tersebut.

2. Tujuan Penyitaan

Pada dasarnya tujuan suatu penyitaan dalam kepailitan yaitu agar barang/harta kekayaan debitor tidak dipindahtangankan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibaan ataupun disembunyikan oleh debitor maupun untuk menghindari dibebani dengan sewa-menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Sebagaimana diketahui, bahwa ada kemungkinan sebelum

²⁰ M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 282

debitor dijatuhi putusan pailit, debitor telah berperkara dengan orang lain. Mungkin pula dalam sengketa itu, harta debitor pailit dijatuhi sita jaminan atau sita eksekutorial.²¹

Sedangkan penyitaan dalam perdata bertujuan untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap seperti semula selama proses penyelesaian perkara berlangsung, agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat.

Menurut hukum pidana, tujuan dari penyitaan itu sendiri adalah untuk kepentingan pembuktian baik dari penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan. Setelah kasus pidana selesai, barang yang disita tersebut baru dapat dikembalikan kepada yang berhak atau dimusnahkan sesuai dengan putusan Majelis Hakim.

3. Prinsip Pokok Sita

Berikut adalah beberapa prinsip penyitaan yang harus ditaati:²²

1) Sita berdasarkan Permohonan

Menurut Pasal 226 dan 227 HIR pengabulan dan perintah pelaksanaan sita beritikad tolak dari permohonan penggugat. Ada 2 (dua) bentuk permohonan sita yaitu sebagai berikut:

a) Bentuk Lisan

Apabila permohonan sita diajukan secara lisan maka permintaan itu dicatat dalam berita acara sidang dan berdasarkan permintaan itu Hakim memutuskan untuk melakukan sita atau tidak.

Ternyata permintaan tersebut harus mempunyai dasar alasan yang cukup kuat.

b) Bentuk Tertulis

²¹ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 57

²² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 287

Permintaan sita dapat dijadikan satu dalam surat gugatan, dicantumkan pada bagian akhir uraian dalil dan peristiwa gugatan.

2) Permohonan berdasarkan Alasan

Penyitaan merupakan hukuman dan perampasan harta kekayaan tergugat sebelum putusan yang berkekuatan tetap. Oleh karena itu penyitaan sebagai tindakan yang bersifat eksepsional harus benar-benar dilakukan secara cermat berdasarkan alasan yang kuat.

3) Penggugat Wajib Menunjukkan Barang Objek Sita

Permohonan sita tidak berarti semata-mata dilakukan secara umum tanpa menyebut satu per satu barang apa yang hendak disita, permintaan sita yang demikian tidak terang sebab tidak diketahui persis apa saja harta kekayaan tergugat sehingga tidak jelas barang apa dan mana yang hendak disita.

4) Larangan Menyita Milik Pihak Ketiga

Pada Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses perkara. Tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara.

5) Mendahulukan Penyitaan atas Barang Bergerak

Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR penyitaan atas harta kekayaan tergugat tidak boleh langsung diletakkan atas barang tidak bergerak. Prioritas pertama adalah menyita barang-barang bergerak, sita terhadap barang tidak bergerak diperbolehkan sepanjang nilai barang tidak bergerak belum mencukupi untuk melunasi pembayaran jumlah tuntutan.

6) Dilarang Menyita Barang tertentu

Pasal 22 UU KPKPU menyebutkan bahwa terdapat berupa pengecualian larangan meletakkan sita terhadap barang tertentu yaitu :

- a) Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
- b) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunjangan, sejauh mana yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- c) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberikan nafkah menurut Undang-Undang.

4. Kekuatan Mengikat Sita Sejak Diumumkan

Terdapat syarat formil untuk mendukung suatu keabsahan dan kekuatan mengikat sita kepada pihak ketiga adalah pengumuman berita acara sita. Selama belum diumumkan, keabsahan dan kekuatan formilnya baru mengikat kepada para pihak yang bersengketa, belum mengikat kepada pihak ketiga. Jadi selama penyitaan belum diumumkan pihak ketiga yang melakukan transaksi atas barang yang disita dapat dilindungi sebagai pembeli atau pemegang jaminan maupun penyewa yang beritikad baik. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 199 ayat (1) HIR. Terhitung sejak hari pengumuman atau pemberitahuan penyitaan, tersita dilarang memindahkan, mengagunkan atau menyewakan kepada pihak ketiga. Setiap penyitaan waib didaftarkan dengan cara menyampaikan salinan berita acara sita kepada kantor pendaftaran tanah setempat atau pada kantor pejabat yang berwenang.

5. Bentuk-bentuk Sita

a) Sita Perdata

Berikut adalah macam-macam sita dalam Hukum Perdata, yaitu.²³

1) Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*)

Sita eksekusi adalah sita yang dilakukan atas barang-barang yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana barang-barang tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung tetapi harus melalui pelelangan. Dasar hukum dari sita eksekusi adalah Pasal 298 RBg. Sita eksekusi biasanya dilaksanakan setelah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

2) Sita Harta Bersama (*Maritaal Beslag*)

Sita harta bersama dimohonkan oleh pihak istri terhadap harta perkawinan baik yang bergerak atau tidak bergerak sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian agar selama proses berlangsung barang-barang tersebut tidak dialihkan suami/istri. Bahwa sita terhadap harta bersama dapat juga diajukan oleh suami/istri walaupun tidak terjadi perceraian bilamana suami/istri melakukan tindakan yang mengarah pada pengalihan harta bersama.²⁴

3) Sita terhadap Barang Milik Penggugat (*Revindicatoir Beslag*)

Sita revindicatoir adalah penyitaan atas barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat (*revindicatoir*). Maksudnya penyitaan ini adalah agar barang yang digugat itu jangan sampai dihilangkan selama proses berlangsung. Syarat atau alasan pokok sita revindikasi adalah

²³ *Ibid.*, hlm. 316

²⁴ **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007**, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 422

adanya obyek sengketa barang bergerak, terdapat pemohon pemilik barang, permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan dan barang dikuasai tergugat tanpa hak.

4) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Sita jaminan mengandung arti, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan kata lain bahwa terdapat barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, dipindahtangankan kepada orang lain.²⁵

5) Sita Penyesuaian/Persamaan (*Vergelijkend Beslag*)

Sita persamaan tidak diatur dalam HIR maupun R.Bg, tetapi diatur dalam Pasal 463 Rv yang mengatur tentang eksekusi barang bergerak. Namun demikian telah berkembang dalam praktek bahwa sita persamaan itu dapat saja dilakukan terhadap barang tidak bergerak, yang tata caranya mengikuti ketentuan dalam Pasal 463 Rv. Apabila setelah dilakukan penyitaan, tetapi sebelum dilakukan penjualan barang yang disita diajukan permintaan untuk melaksanakan suatu putusan Hakim yang ditujukan terhadap penanggung hutang kepada Negara, maka penyitaan yang telah dilakukan itu dipergunakan juga sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menuntut putusan Hakim itu dan Hakim Pengadilan Negeri jika perlu memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belum disita terlebih dahulu, sehingga akan dapat mencukupi untuk membayar jumlah uang menurut putusan-putusan itu dan biaya penyitaan lanjutan itu.²⁶

b) Sita Kepailitan

²⁵ Retnowulan Sutantio, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 98

²⁶ *Ibid.*

Sita umum yang dimaksud dalam kepailitan adalah rangkaian penyitaan yang meliputi seluruh harta kekayaan debitur pailit sejak putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sita umum mengakhiri sita dan eksekusi sendiri-sendiri yang dapat dilakukan oleh para kreditor sehingga para kreditor harus tunduk secara bersama-sama. Sita umum yang dimaksud dalam konsep kepailitan berbeda dengan sita khusus dalam hukum perdata.

Sitaan umum bertujuan untuk mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya. Perlindungan terhadap kreditor lainnya dalam Undang-Undang kepailitan adalah adanya ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh debitur, sebaliknya terdapat pula ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditor.²⁷ Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, maka segala bentuk penyitaan akan terhapus. Akan tetapi ada beberapa jenis penyitaan yang otomatis hapus dengan adanya putusan kepailitan itu, yaitu:²⁸

- 1) Sitaan gadai, yaitu apabila sitaan itu menyangkut barang milik orang lain yang kebetulan si pailit sebagai pemegang gadai;
- 2) Sitaan revindicatoir, yaitu sitaan yang diletakkan atas barang yang bukan milik si pailit.

c) Sita Pidana

Pengertian sita pidana atau penyitaan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk

²⁷ Siti Anisah, “Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan”, Jurnal Hukum Nomor Efisi Khusus, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 16 Oktober 2009, hlm. 30-50

²⁸ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 59

kepentingan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Sita pidana merupakan tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan, setelah lewat taraf penyidikan tidak lagi dapat dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Dengan penegasan Pasal 38 KUHAP tersebut telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang untuk melakukan penyitaan.

Tindakan penyitaan dalam pidana hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Terhadap objek sitaan yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena perkara kepailitan dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

Benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana. Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang Pengadilan. Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa. Barang bukti yang merupakan obyek barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa dijadikan barang bukti.²⁹

D. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

²⁹ SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Pradya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 98

Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti, tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan

sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Dalam arti sempit perlindungan hukum adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai. Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa maka sistem perlindungan hukum yang diterapkan harus berpijak pada ideologi negara pula.

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah:

- 1) Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai ideologi negara. Dengan kata lain Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan dan diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.

2) Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.

1. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2, yaitu:

1) Perlindungan Hukum yang Preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen* dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

2) Perlindungan Hukum yang Represif.

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila telah terjadi sengketa. Terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu :

a) Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Umum

Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan menempuh perlindungan oleh penguasa.

b) Instansi Pemerintah yang Merupakan Lembaga Banding Administrasi

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang didasarkan pada peraturan perUndang-Undangan, sedangkan penelitian normatif adalah penelitian di bidang ilmu hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang ada¹.

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dalam penulisan ini untuk melakukan analisa terhadap status harta pailit dalam Putusan pailit perkara KSP Pandawa Group serta perlindungan hukum bagi kreditor sebagai pihak ketiga yang dirugikan berdasarkan suatu Putusan perkara pidana terkait harta pailit yang menjadi barang rampasan negara.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perUndang-Undangan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan PerUndang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan patut dengan permasalahan yang sedang ditangani.

¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35

Pendekatan perUndang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi².

Pendekatan perUndang-Undangan yang digunakan penulis adalah dengan mempelajari peraturan-peraturan yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lain yang terkait dengan penulisan ini.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus penulis berupaya memahami dan menemukan *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dengan memperhatikan fakta materiel atas suatu kasus. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut³.

Dalam hal ini penulis melakukan pendekatan terhadap kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157

³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 153

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 37/PDT.SUS-PKPU/2017/PN. Jkt. Pst.
5. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor Putusan Pidana Nomor 424 /Pid.Sus/2017/PN.Dpk

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.⁴ Bahan hukum sekunder tersebut digunakan sebagai bahan untuk dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah artikel media, hasil karya tulis, makalah, dan lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis berupa ensiklopedia, kamus, jurnal hukum, dan berbagai sumber informasi lainnya yang terkait dengan penulisan ini.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 392

⁵ *Ibid.*,

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari Perpustakaan, Buku atau literatur, Peraturan PerUndang-Undangan, Peraturan Pelaksana, Internet, Surat Kabar, dan pendapat para ahli.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dengan cara melaksanakan studi kepustakaan yang diperoleh dari :

- a. Perpustakaan Universitas Brawijaya;
- b. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2. Akses Internet

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini juga diperoleh dengan melakukan daring atau penelusuran situs-situs yang terkait terhadap penulisan ini melalui internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini teknik yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah data adalah dengan analisa interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas

suatu persoalan dalam hukum. Metode penafsiran yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode:

1. Penafisran Gramatikal, yaitu suatu cara penafsiran yang menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat Undang-Undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya⁶.
2. Penafsiran Sistematis, yaitu suatu cara penafsiran berdasarkan ketentuan yang terdapat pada peraturan perUndang-Undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada definisi perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan⁷.

F. Definisi Konseptual

Berdasarkan judul yang dikemukakan penulis, maka definisi konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

2. Sita Umum

Sita umum adalah penyitaan yang dikenal dalam hukum perdata khususnya hukum kepailitan yang mengatur hubungan antar-individu yang bersifat privat.

3. Sita Pidana

⁶ R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 100

⁷ C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum**, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 36

Sita Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan penuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

4. Kurator

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau Kurator atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawasan sesuai dengan Undang-Undang.

5. Kreditor

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

6. Debitor

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

7. Harta Pailit

Harta pailit adalah meliputi seluruh kekayaan debitor baik yang sudah ada pada saat pernyataan pailit diucapkan oleh majelis hakim pengadilan niaga serta segala sesuatu yang baru akan diperoleh oleh debitor selama berlangsungnya kepailitan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Status Harta Pailit Dalam Kasus KSP Pandawa Group berdasarkan Putusan PKPU Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/Pn. Jkt. Pst yang dirampas negara berdasarkan Putusan Pidana Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN. Dpk.

1. Kasus Posisi Pandawa

Perkara Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/pn Pn. Jkt.Pst antara Farouk Elmi Husain seorang Warga Negara Indonesia sebagai Pemohon melawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa suatu badan hukum yang didirikan serta tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagai Termohon I dan Nuryanto seorang warga negara Indonesia sebagai Termohon II. Kedudukan hukum Termohon PKPU I selaku badan hukum koperasi dan Termohon PKPU II selaku pendiri sekaligus sebagai ketua koperasi yang memimpin dan mengelola penuh termohon PKPU I berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Bahwa Termohon I PKPU merupakan suatu badan hukum yang berbentuk koperasi dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group, sedangkan termohon PKPU II adalah selaku pendiri sekaligus sebagai ketua koperasi atau pemimpin KSP Pandawa Mandiri Group. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian telah menyebutkan bahwa “Pengurus, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya; Bahwa

berdasarkan ketentuan tersebut, maka Termohon PKPU II turut menanggung kerugian yang diderita oleh Termohon PKPU I oleh karena telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utangnya, baik kepada Pemohon PKPU, Kreditor lain yang disertakan oleh Pemohon PKPU serta kreditor-kreditor lain sesama anggota koperasi simpan pinjam pandawa mandiri group yang secara *notoire feiten* diketahui berjumlah sangat banyak (massal) dan diyakini mencapai puluhan atau ratusan ribu orang jumlahnya sehingga termohon PKPU II selaku ketua koperasi yang notabene sebagai pucuk pimpinan tertinggi koperasi simpan pinjam pandawa mandiri group memiliki *legal standing* yang kuat untuk dapat ditarik sebagai penanggung/guarantor yang bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar seluruh kewajiban utang termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU, Kreditor lain yang disertakan oleh Pemohon PKPU serta kreditor-kreditor lain sesama anggota koperasi simpan pinjam Pandawa Mandiri Group.

Pada perkara ini Pemohon PKPU serta kreditor lain yang disertakan oleh Pemohon PKPU mempunyai piutang yang merupakan uang penyertaan modal yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada termohon PKPU. Pemohon PKPU telah memberikan surat teguran keras/somasi sebanyak 2 kali pada tanggal 9 dan 14 Februari 2017 namun termohon tidak juga melakukan pembayaran atas tagihan utang hingga sampai diajukannya permohonan PKPU.

Pada inti pertimbangan Hakim diketahui bahwa pada tanggal 28 November 2016 terdapat surat pernyataan yang diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Ketua Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam Lumbantobing bahwa Nuryanto sebagai termohon PKPU II dengan jabatan sebagai ketua koperasi simpan pinjam pandawa mandiri group akan

mengembalikan dana investor seluruhnya pada tanggal jatuh tempo paling lambat tanggal 1 februari 2017, tetapi pada tanggal yang telah jatuh waktu tersebut dan telah dilakukan penagihan ternyata termohon PKPU II tidak membayar utang termohon PKPU terhadap pemohon PKPU. Kemudian telah menjadi pengetahuan hakim bahwa saat itu Nuryanto sedang berada dalam tahanan kepolisian karena tersangkut perkara pidana sehingga Nuryanto dapat diperkirakan tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar seluruh kewajiban utang termohon PKPU kepada pemohon PKPU dan para kreditor lainnya. Selanjutnya majelis hakim berpendapat permohonan PKPU dari pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU, permohonan PKPU sementara yang dimohonkan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dalam tenggang waktu paling lama 45 hari terhitung sejak putusan PKPU Sementara ditetapkan.

Maka dengan ini pertimbangan hakim tersebut mengabulkan permohonan penundaan pembayaran utang sementara (PKPUS) kemudian mengangkat Hakim Pengawas serta Tim Pengurus dalam proses PKPU dari para termohon PKPU. Setelah diberikan PKPU sementara dan dilaksanakan persidangan maka majelis hakim memberikan ini pertimbangan bahwa majelis hakim telah mendengar Laporan Hakim Pengawas, alasan Pengurus serta Kreditor yang pada pokoknya mohon agar PKPU sementara berakhir karena kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap sebagaimana ketentuan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU. Maka atas ini pertimbangan Majelis Hakim tersebut pada tanggal 5 Juni 2017, maka Majelis Hakim menolak

permohonan PKPU tetap, menyatakan Termohon PKPU I KSP Pandawa Mandiri Group dan Termohon PKPU II Nuryanto pailit dengan segala akibat hukumnya dan mengangkat Para Kurator dalam proses kepailitan tersebut.

Setelah adanya putusan Pailit pada yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, maka kurator menurut Pasal 16 UU KPKPU berwenang melaksanakan tugas pengurus dan pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Namun tugas pengurusan dan pemberesan tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat Harta Pailit disita sebagai barang bukti dalam proses persidangan. Menurut Pasal 1 ayat 16 KUHAP pengertian penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan merupakan tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat tahap penyidikan maka tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itulah sebabnya dalam Pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama dari penyitaan menurut hukum pidana adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan. Kemudian pada Pasal 39 ayat (2) KUHAP, untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana, barang yang disita dalam perkara perdata dan kepailitan dapat disita dalam perkara pidana. Agar penyitaan dalam korteks yang seperti itu dapat objektif, maka Pengadilan

harus benar-benar mempertimbangkan faktor relevansi dan urgensi yang terdapat pada Pasal 39 KUHP secara utuh.¹

Menurut hukum kepailitan yang diatur pada Pasal 31 ayat (2) UU KPKPU menegaskan bahwa putusan pernyataan pailit akan membawa akibat segala putusan Hakim yang menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitor yang telah diadakan sebelum diputuskan pernyataan pailit harus segera dihentikan, sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman paksaan badan yang dapat dilaksanakan. Segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan dibatalkan demi hukum. Bila dianggap perlu, Hakim Pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan. Maka, sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan, eksekusi-eksekusi putusan Hakim lainnya yaitu segala putusan Hakim yang menyangkut harta kekayaan debitor pailit harus dihentikan, demikian pula dengan penyitaan yang dilakukan harus dibatalkan demi hukum. Kemudian diatur juga tentang Sita Persamaan atau *Vergelijkend Beslag* yang tidak diatur dalam HIR maupun R.Bg, tetapi diatur dalam Pasal 463 Rv yang mengatur tentang eksekusi barang bergerak yaitu sebagai berikut :

Pasal 463 Rv

“Apabila juru sita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan lagi. Namun juru sita mempunyai wewenang untuk mempersamakan barang-barang yang disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh tersita kepadanya. Juru sita kemudian dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam Berita Acara itu dan segera kepada penyita pertama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466 Rv. Berita Acara sita persamaan ini berlaku sebagai sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama.”

¹ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 276

Namun dalam praktek telah berkembang bahwa sita persamaan itu dapat saja dilakukan terhadap barang tidak bergerak, yang tata caranya mengikuti ketentuan dalam Pasal 463 Rv. Tetapi apabila sita jaminan (sita jaminan utama) telah menjadi sita eksekutorial dilelang atau sudah dieksekusi riil, maka sita persamaan dengan sendirinya menjadi hapus demi hukum dan apabila sita jaminan (sita jaminan utama) dicabut atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka sita persamaan sesuai dengan urutannya menjadi sita jaminan (sita jaminan utama).²

Pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Depok tersebut Nuryanto didakwa dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdapat fakta di persidangan bahwa masyarakat yang menempatkan uangnya di Pandawa Group baik secara langsung kepada terdakwa maupun melalui para ledaer yakni kurang lebih sebanyak 569.000 orang dengan total dana kurang lebih Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) dengan total Surat Perjanjian Kontrak (SPK) sebanyak kurang lebih 1.000.000 (satu juta) lembar. Atas pertimbangan hakim yang pada intinya adalah bahwa barang-barang yang disita dari penguasaan terdakwa tersebut merupakan barang bernilai ekonomi, yang dihasilkan dari tindak pidana yang telah terbukti sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum. Bahwa barang tersebut diatas didapatkan dari dana keuntungan sebagai investor pribadi maupun dana referensi yang didapatkan dari perekrutan para nasabah. Pada pertimbangan majelis hakim terdapat keadaan yang memberatkan yaitu

² Mahkamah Agung RI, **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II**, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2007, hlm. 83-85

Bahwa terdakwa sebagai pendiri dari Pandawa Group dan yang membuat sistem penghimpunan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dalam hal ini Undang-Undang Perbankan dapat merusak perekonomian Negara, Perbuatan terdakwa merugikan banyak orang, terdakwa sudah menikmati hasilnya dari kegiatan penghimpunan dana yang dilakukannya dan tidak terdapat keadaan yang mengringankan.

Atas dasar pertimbangan majelis hakim maka Terdakwa Nuryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut” dengan Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN. Depok pada tanggal 5 desember 2017 menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta menetapkan barang bukti Nomor 109 sampai dengan nomor 155 yang berupa uang, benda bergerak, dan tidak bergerak dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara.

2. Akibat Putusan Pailit Terhadap Debitor

Menurut Profesor Radin tujuan semua Undang-Undang Kepailitan (*Bankruptcy Laws*) adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak dari berbagai penagih terhadap asset seorang debitor yang tidak cukup nilainya (*debt collection system*).³ Aset debitor tersebut bukan lagi dibawah kekuasaan dan menjadi hak dari debitor pailit. Pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU KPKPU menyatakan bahwa:

³ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 29-30

Pasal 24

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.”

Pada Pasal 24 UU KPKPU tersebut telah disebutkan bahwa debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Menurut

Harus dicermati bahwa dengan diputuskannya menjadi debitor pailit bukan berarti debitor kehilangan hak keperdataannya (*volkomen handelingsbevoegheid*) untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan.⁴ Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Sementara itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan lainnya misalnya untuk melangsungkan pernikahan dirinya, mengawinkan anaknya sebagai wali, membuat perjanjian nikah, menerima hibah (sekali pun hibah tersebut demi hukum menjadi bagian harta pailit) mengurus harta keayaan pihak lain, menjadi kuasa pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa, debitor masih berwenang (masing memiliki kemampuan hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan tersebut. Dengan demikian, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hanya harta kekayaan debitor pailit yang berada dibawah pengampuan (dibawah penguasaan dan pengurusan pihak lain) sedangkan debitor pailit itu sendiri tidak berada di bawah pengampuan seperti yang terjadi terhadap anak dibawah umur atau orang yang sakit jiwa yang dinyatakan berada di bawah pengampuan.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 190

Akibat kepailitan juga berlaku untuk perusahaan debitor atau badan hukum lainnya. Sebagai akibat putusan tersebut ekuasan direksi suatu perseroan terbatas dan badan-badan hukum lainnya untuk mengelola perusahaan debitor atau badan hukum tersebut terkekang, sekalipun mereka tetap menjabatnya. Pengurus perusahaan debitor atau badan-badan hukum lainnya itu menjadi *functus officio*.⁵ Segala sesuatunya diputus dan dilaksanakan oleh kurator. Mereka yang menjadi debitor pailit tidak memiliki kendali terhadap kurator, sebaliknya mereka harus mematuhi petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah kurator. Menurut Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU:

Pasal 15 ayat (1)

“Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan.”

Pasal 69 ayat (1)

“Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.”

Berdasarkan kedua Pasal diatas dapat dipahami bahwa pengampu harta kekayaan debitor pailit atau harta pailit adalah Kurator. Berkenaan dengan status debitor pailit yang demikian itu dan karena selanjutnya harta kekayaan debitor pailit yang demikian itu dan karena selanjutnya harta kekayaan debitor pailit tidak lagi diurus oleh debitor tetapi oleh kuratornya, maka sesuai ketentuan Pasal 26 UU KPKPU:

Pasal 26

“Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.”

Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan

⁵ *Ibid.*, hlm. 191

suatu penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

Berdasarkan pasal diatas maka dapat dipahami bahwa tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Artinya semua pengajuan gugatan melalui pengadilan perdata atau pengadilan niaga tidak diajukan oleh atau terhadap debitor tetapi oleh atau terhadap kurator. Sejalan dengan itu pula menurut Pasal 105 ayat (4) bahwa semua surat pengaduan dan keberatan yan berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada kurator.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU KPKPU apabila ada pihak lain yang mengajukan gugatan terhadap debitor pailit dan kemudian gugatan itu mengakibatkan penghukuman terhadap debitor pailit, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan terhadap harta pailit. Menurut Pasal 27 UU KPKPU:

Pasal 27

“Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.”

Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Dengan begitu, gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU KPKPU tersebut tidak dapat diterima oleh hakim sebagai gugatan dan diperiksa perkaranya tetapi hanya dapat diterima sebagai laporan untuk pencocokkan tagihannya dalam rangka verifikasi utang-piutang dari debitor pailit yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU KPKPU yang menentukan gugatan yang bersumber pada kewajiban atas beban harta kekayaan debitor pailit tidak dapat diajukan kepada debitor sendiri tetapi kepada kurator.

Putusan pailit berakibat kepada harta yang dimiliki debitor pailit. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit berada dibawah sita umum. Artinya penyitaan umum itu berlaku untuk siapapun bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita jaminan yang diputuskan oleh hakim perdata berjenaan dengan permohonan penggugat dalam sengketa perdata, Menurut Pasal 21 UU KPKPU:

Pasal 21

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”

Terdapat pengecualian pada ketentuan Pasal 21 UU KPKPU mengenai harta pailit. Pengecualian pada Pasal tersebut berarti ada diantara harta kekayaan debitor baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari yang tidak termasuk ke dalam harta pailit. Sehingga tidak semuanya harta milik debitor dapat dijadikan jaminan bagi para kreditor. Menurut Pasal 184 ayat (3) UU KPKPU, debitor pailit dapat diberikan sekedar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang terlebih dahulu ditentukan oleh hakim pengawas. Dapat dilihat bahwa ketentuan Pasal 184 ayat (3) UU KPKPU tersebut merupakan aspek kemanusiaan dari UU KPKPU terhadap debitor. Dengan kata lain, Pasal 184 ayat (3) memberikan pengecualian bahwa ada dari di antara harta pailit yang tidak akan dilakukan pemberesan oleh kurator. Menurut Prof. Sutan Remy, terdapat pengucualian yang lain terhadap harta pailit debitor yaitu apabila debitor merupakan perusahaan dan diharapkan masih akan tetap menjalankan usahanya setelah tindakan pemberesan oleh kurator. Menurut Pasal 184 ayat (2) UU KPKPU harta pailit perusahaan yang boleh dijual oleh kurator hanya benda-benda yang tidak diperlukan untuk

keperluan perusahaan. Hal tersebut merupakan wujud dalam penjelasan Umum UU KPKPU yaitu bahwa UU KPKPU didasarkan pada beberapa asas diantara lain adalah asas keberlangsungan usaha dimana dalam penjelasannya bahwa dalam UU KPKPU terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

Pada Pasal 22 terdapat pula pengecualian lainnya yaitu:

Pasal 22

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;*
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau*
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberikan nafkah menurut Undang-Undang.”*

Selain harta kekayaan debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU KPKPU terdapat suatu pengecualian mengingat adanya hak separatis yang dimiliki oleh kreditor yang merupakan pemegang hak jaminan, harta kekayaan debitor yang telah dibebani suatu hak jaminan yang dapat berupa hak tanggungan, hipotek, gadai, dan fidusia dikecualikan pula dari harta pailit. Sehingga segala harta yang termasuk harta pailit namun dibebani hak jaminan bukanlah termasuk harta pailit untuk jaminan kepada semua kreditornya.

3. Status Harta Pailit dalam Kasus KSP Pandawa

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU dengan adanya suatu putusan pernyataan pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Hakim, Debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sehubungan dengan berlakunya ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU tersebut maka haruslah ada yang mengurus harta pailit tersebut dan kemudian membayar utang debitor kepada kreditornya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 UU KPKPU :

Pasal 69

“Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.”

Maka kurator memiliki wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan untuk menjadi pengampu harta pailit yang dimiliki debitor. Kurator yang diangkat dalam suatu putusan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) UU KPKPU harus dipastikan independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara. Pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor dan tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor.

Sebagai pengampu harta debitor pailit kurator wajib melakukan pengamanan harta pailit. Bisa saja dimungkinkan bahwa ada pihak tertentu yang akan merugikan harta pailit maka sebagaimana dituliskan pada Pasal 98 UU KPKPU :

Pasal 98

"Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima."

Berdasarkan dalam rangka mengamankan harta pailit dan meningkatkan nilai harta pailit, Kurator berwenang melakukan berbagai tindakan antara lain misalnya melakukan penyegelan, memiliki akses pada setiap rekening bank Debitor Pailit tanpa terhalang dengan ketentuan kerahasiaan bank, melakukan pemutusan, dan mempekerjakan karyawan baru. Semua tindakan yang dilakukan Kurator tersebut, biayanya dibebankan kepada harta pailit.⁶ Kewenangan Kurator tersebut datang dengan tanggung jawab yang berat. Menurut Pasal 72 UU KPKPU:

Pasal 72

"Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit."

Sebagaimana konsekuensi ketentuan pada Pasal 72 UU KPKPU, kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para kreditor konkuren, dirugikan. Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seharusnya diterima dari hasil penjualan harta pailit sebagai akibat perbuatan kurator.⁷

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, kurator dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi oleh pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan Kurator. Kurator bahkan harus

⁶ Syamsudin M. Sinaga *Op. Cit.*, hlm. 206

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 226

bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu.⁸ Atas dasar adanya pertanggungjawaban Kurator secara pribadi maka memang benar bahwa tugas kurator berat seperti yang dijelaskan pada UU PKPU. Selain itu, Kurator mengemban *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations* adalah karena kurator memiliki *fiduciary relationship*. *Fiduciary duties* kurator adalah terhadap:⁹

- 1) Pengadilan; dalam UU Kepailitan Indonesia diwakili oleh Hakim Pengawas.
- 2) Debitor pailit.
- 3) Para kreditor.
- 4) Para pemegang saham.

Sehingga dapat dipahami bahwa kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitor, para kreditor, dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut.

Asas hukum Kepailitan Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas-asas Hukum Perdata, karena Hukum Kepailitan sebagai sub sistem dari Hukum Perdata Nasional merupakan bagian utuh dari Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional. Hukum Kepailitan Indonesia sebagian besar materi muatannya mengatur tentang sita dan eksekusi. Oleh karena itu Hukum Kepailitan merupakan kebulatan yang utuh dengan peraturan tentang sita dan eksekusi yang diatur dalam Hukum acara Perdata. Asas hukum yang umumnya berlaku dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, juga menjadi asas hukum yang berlaku dalam Hukum Kepailitan Indonesia, kendatipun tidak disebutkan secara tegas. Asas Hukum Kepailitan yang diatur dalam Hukum Perdata merupakan asas

⁸ *Ibid.* hlm. 227

⁹ *Ibid.* hlm. 228

umum Hukum Kepailitan Indoneia, sedangkan asas khususnya adalah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004.¹⁰

Lembaga Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan Pasal 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap utang-utangnya.¹¹

Pasal 1131

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Pasal 1132

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutan masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Oleh karena ketentuan yang terdapat pada Pasal 1131 KUH Perdata maka semua harta kekayaan debitor pailit menjadi agunan bagi pelaksanaan kewajibannya bukan kepada kreditor tertentu saja tetapi juga semua kreditor lainnya. Selanjutnya pada Pasal 1132 KUH Perdata tersebut mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya. Menurut hemat penulis, dengan adanya ketentuan pada Pasal 1131 dan 1132 dalam hukum perdata yang menjadi landasan dari hukum kepailitan maka setelah adanya putusan pernyataan pailit dan berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU KPKPU yang telah dijelaskan sebelumnya, maka harta debitor pailit adalah milik para Kreditornya bukan lagi milik debitor. Berdasarkan fakta yang terjadi pada kasus KSP Pandawa adalah

¹⁰ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 41

¹¹ Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit.*, hlm. 12

Putusan pernyataan pailit lebih dahulu ada sebelum adanya Putusan perkara pidana yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan Pasal 115 ayat (1) UU KPKPU ditentukan, semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor yang mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.¹² Harta debitor pailit tersebut seperti yang dijelaskan sebelumnya sudah berada pada kewenangan Kurator dan Debitor kehilangan hak atas kekayaannya sejak adanya putusan pailit yang nantinya setelah adanya proses rapat kreditor dan pencocokan piutang dilakukan pemberesan harta pailit yang kemudian harta tersebut dibagikan menurut asas dalam hukum kepailitan *pari pasu pro rata parte* kepada para kreditor. Sehingga setelah adanya putusan pailit maka sejak itu pula harta kekayaan debitor adalah milik dari kreditor yang telah diakui piutangnya.

¹² Sutan Remy, *Op.Cit.*, hlm. 268

B. Analisis Perlindungan Hukum Kreditor Yang Dirugikan Dalam Putusan Pidana Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN. Dpk.

1. Kerugian Kreditor Akibat Putusan Pidana

Menurut Profesor Radin, tujuan semua Undang-Undang Kepailitan (*bankruptcy laws*) adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak dari berbagai penagih terhadap asset seorang debitor yang tidak cukup nilainya (*debt collection system*)¹³. Hukum kepailitan sebagai suatu bidang hukum yang bersifat khusus, tidak dapat dipungkiri sebagai sesuatu yang asing bagi masyarakat. Akibatnya seringkali orang salah memahami hukum kepailitan dan berbagai macam perangkatnya. Termasuk mengenai pemilihan jalur penyelesaian suatu perkara apakah dengan melalui proses peradilan di pengadilan perdata khusus seperti kepailitan ataukah pada pengadilan pidana. Pada kasus KSP Pandawa Mandiri Group, korban yang berjumlah masal mengharapkan uang mereka yang masuk ke dalam KSP Pandawa Mandiri Group untuk dapat dikembalikan. Sebagian mengajukan permohonan melalui jalur pengadilan perdata khusus yaitu kepailitan dan sebagian lagi mengajukan dan menempuh proses pidana. Akibatnya terdapat dua Putusan Pengadilan Perdata dan Pidana. Namun pada kasus KSP Pandawa Mandiri Group pernyataan pailit KSP Pandawa Mandiri Group mendahului adanya Putusan Pidana Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN. Dpk.

Adanya putusan pernyataan pailit tersebut mendahului putusan pidana tidak membuat eksekusi dari putusan pernyataan pailit tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan UU KPKPU. Hal itu disebabkan dalam amar Putusan Pidana Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN. Depok menyebutkan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor 109 sampai dengan nomor 155, dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara. Barang bukti nomor 109 sampai

¹³ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 29-30

dengan nomor 155 berupa uang tunai, barang bergerak seperti mobil dan motor, rumah, dan perlengkapan elektronik. Barang-barang yang telah dirampas untuk negara tersebut pada dasarnya seperti yang telah dijelaskan oleh penulis merupakan harta pailit dari debitor yang setelah adanya putusan pernyataan pailit menjadi terpidana berdasarkan putusan pidana tersebut. Harta pailit tersebut telah diletakkan pada sita umum sejak adanya putusan pernyataan pailit yang bertujuan untuk dilakukan pemberesan dengan cara dilelang agar memberikan keadilan berupa pembayaran bagi para kreditor yang semuanya adalah kreditor konkuren berdasarkan Putusan nomor 37/Pdt. Sus-PKPU/2017/PN.Niaga. Jkt. Pst. Diantara sesama para kreditor konkuren mereka memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.¹⁴ Dapat dinyatakan bahwa tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah:¹⁵

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor”, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang Kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.

¹⁴ Sutan Remy, *Op. Cit.*, hlm. 7

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 29-30

2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan *asas pari passu pro rata parte* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing). Di dalam hukum Indonesia *asas pari passu* dijamin oleh Pasal 1132 KUH Perdata.
3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, maka debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya. Putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan debitor berada di bawah sita umum (disebut harta pailit).
4. Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Financial fresh start tidak diberikan kepada debitor, baik debitor perseorangan maupun debitor badan hukum setelah tindakan pemberesan oleh kurator dilakukan. Artinya, apabila setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya debitor selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang yang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya (berdasarkan Pasal 204 UU KPKPU). Penjelasan umum dari Undang-Undang tersebut menyatakan “Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya”. Setelah tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh kurator, debitor kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, artinya debitor boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utang yang belum lunas.

5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan.
6. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor.

Maka dapat dipahami bahwa Undang-Undang Kepailitan memiliki tujuan untuk melindungi Kreditor Konkuren atau *Unsecured Creditors*. Dengan adanya putusan pidana tersebut yang merampas barang bukti yang mana telah dahulu menjadi harta pailit untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara merupakan hal yang sangat merugikan pihak ketiga diluar yang berperkara, yang dalam hal ini adalah para kreditor konkuren yang berjumlah massal.

2. Perlindungan Hukum Kreditor Sebagai Pihak Ketiga Yang Dirugikan

Menurut Sudikno Mertokusumo suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.¹⁶ Pada dasarnya menurut Pasal 1917 KUH Perdata suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak dapat mengikat pihak ketiga. Namun dalam praktek beracara di muka pengadilan sering didapati perkara gugatan *derden verzet* (gugatan perlawanan pihak ketiga) yang mana menurut Pasal 378 RV bila terdapat

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 219

pihak ketiga merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut.

Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini ada dua macam yakni perlawanan terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan perlawanan terhadap sita eksekusi (*eksekutorial beslag*).¹⁷

Perlawanan terhadap sita jaminan tidak diatur dalam HIR, R.Bg., maupun Rv. Namun ada dalam praktek, sedangkan perlawanan sita eksekusi ada diatur dalam HIR, R.Bg., maupun dalam Rv.¹⁸

Apabila melihat perlawanan sita jaminan, penyelesaiannya melalui intervensi *tussenkomst* (pelawan berhadapan dengan Penggugat dan Tergugat), hal tersebut dikarenakan proses perkara masih berjalan dan belum diputus majelis hakim. Namun berbeda halnya dengan Perlawanan terhadap sita eksekusi, penyelesaiannya adalah melalui *derden verzet*. Hal tersebut dikarenakan perkara telah diputus dan perkara hendak dieksekusi maka secara otomatis sita jaminan berubah menjadi sita eksekusi. Dalam itulah terlihat perbedaan cara pengajuan gugatan perlawanan intervensi dengan gugatan *derden verzet*.

Menurut Pasal 379 RV perlawanan itu diajukan pada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan acara biasa. Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya.¹⁹ Perlawanan dari pihak ketiga pada umumnya didasarkan atas hak milik. Yakni barang yang disita itu sesungguhnya adalah milik orang lain, dalam hal ini pihak ketiga tersebut. Mengenai hak milik diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata yang menyatakan :

Pasal 570

¹⁷http://arsip.ptamataran.go.id/syscontent/uploads/file/eDoc/Artikel/Artikel_Sarwohadi_2017-04-11_Penyelesaian_Derden_Verzet.pdf

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Jurnal Rechtsens vol.3 Nomor 2, **Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata**, Bendesa Made Des, 2014

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perUndang-Undangan.”

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”

Disamping itu juga pada Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa:

Pasal 20

“Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.”

“Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.”

Pada prinsipnya pihak ketiga yang mengajukan perlawanan adalah hak kepemilikan barang yang dipunyai oleh pihak ketiga yang dijadikan jaminan.²⁰ Apabila perlawanan tersebut dikabulkan maka putusan pengadilan yang terbukti merugikan pihak ketiga harus diperbaiki. Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan disebut “Pelawan”, sedangkan penggugat semula yang memohonkan sita tersebut, disebut sebagai “Terlawan Penyita”, dan pihak tergugat yang disita disebut “terlawan tersita”, perkara yang diajukan disebut bantahan atau perlawanan pihak ketiga *derden verzet* atau *verzet door derden*.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, **Praktek Peradilan Perdata**, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011, hlm. 35

Perlawanan terhadap sita dalam hal ini objek sengketa yang diajukan adalah hak milik pihak ketiga yang harus dibuktikan. Dalam hal pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses pengadilan perdata, salah satu yang menjadi tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya suatu hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.²²

Seperti yang telah dipahami bahwa terdapat syarat untuk melakukan perlawanan sebagai pihak ketiga yang nyata dirugikan dalam suatu putusan yaitu adanya hak milik terhadap barang yang disita tersebut. Dalam hal ini melihat ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata seperti yang kita ketahui pada kasus KSP Pandawa Group, harta pailit debitor adalah milik para kreditornya karena merupakan jaminan untuk perikatan-perikatan debitor terhadap kreditor. Setelah adanya putusan pailit maka dengan itu semakin jelas hubungan hukum harta debitor terhadap para kreditornya yang dapat dipersamakan sebagai hak milik. Bahwa harta debitor itu digunakan untuk pemberesan kepailitan debitor dibawah kewenangan Kurator serta Hakim Pengawas. Setelah kurator melakukan tugasnya untuk mengurus dan membereskan harta pailit maka seluruhnya harta pailit tersebut dibagi kepada para kreditornya sesuai dengan *asas pari pasu pro rata parte*. Sehingga dengan kata lain harta debitor yang telah menjadi harta pailit adalah milik dari para kreditor yang telah diakui piutangnya dalam proses kepailitan oleh kurator. Walaupun

²² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, Bandung , Alumni, 1983, hlm. 53

hak milik secara yuridis adalah atas nama debitor namun dengan adanya putusan pernyataan pailit maka debitor kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai hartanya sehingga harta debitor tersebut setelah adanya kepailitan adalah menjadi milik para kreditornya.

Kasus KSP Pandawa group dimana kreditor sebagai pihak ketiga dirugikan dengan adanya putusan pidana yang sudah *inkracht* namun pada putusan tersebut tidak mempertimbangkan adanya suatu putusan hakim terlebih dahulu yaitu pernyataan pailit atas si debitor ataupun dalam hal tersebut adalah terpidana. Dalam amar putusan pidana Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN. Dpk. yang terpidananya adalah debitor menyatakan bahwa barang bukti dalam persidangan dirampas oleh negara, dimana barang bukti tersebut memiliki status sebagai harta pailit, maka sudah seharusnya kreditor memperoleh perlindungan dan kepastian hukum untuk mendapatkan pembayaran atas utang-utang debitor tersebut sebab apabila dalam kasus KSP Pandawa Group ini semua barang bukti dirampas oleh negara maka harta debitor yang akan digunakan untuk penyelesaian kepailitan terhalang akibat harta pailit tidak cukup. Pada praktiknya, sering sekali masyarakat tidak memahami bahwa putusan pengadilan terhadap perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan terdakwa saja, namun putusan pengadilan juga memuat eksekusi terhadap barang bukti yang ada selama proses persidangan berlangsung. Suatu putusan hakim menyangkut barang bukti dalam perkara pidana tidaklah tertutup kemungkinan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya dikemudian hari seperti yang terjadi pada kasus KSP Pandawa Mandiri Group tersebut. Termasuk timbulnya perlawanan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya atas barang bukti tersebut seperti para kreditor dari KSP Pandawa Mandiri Group. Dengan kata lain, seseorang yang mengaku sebagai pemilik hak atas barang bukti yang

disita atau dirampas dapat mengajukan perlawanan sebagai upaya hukum melalui peradilan perdata.²³

Perlawanan pihak ketiga melalui peradilan perdata dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak ketiga untuk memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas berdasarkan putusan menyangkut barang bukti tindak pidana oleh hakim/pengadilan walaupun secara yuridis belum diatur secara khusus dalam ketentuan formil mengenai proses peradilan di Indonesia.²⁴ Maka dalam hal ini terdapat ketidakpastian hukum bagi para kreditor sebagai pihak ketiga yang dirugikan dalam hal ini adalah KSP Pandawa group. Dimana para kreditor membutuhkan adanya suatu perlindungan hukum yang memberikan kepastian bagi mereka bahwa memang benar ketika suatu putusan pernyataan pailit telah ada dahulu sebelum adanya suatu putusan pidana *inkracht* dengan amar putusan yang merampas barang bukti yang lebih dahulu menjadi harta pailit tidak dirugikan. Karena pada faktanya perlawanan pihak ketiga melalui peradilan perdata sebagai bentuk hukum bagi pihak ketiga memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas berdasarkan putusan menyangkut barang bukti tindak pidana oleh hakim/pengadilan secara yuridis belum diatur secara khusus dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian maka dalam hukum acara pidana yang berlaku saat ini bahwa mengenai isitah upaya tindak pidana miliknya yang dirampas dalam putusan pengadilan, diketahui tidaklah seragam, karena ada yang disebut dengan istilah “keberatan” maupun “permohonan”.²⁵ Selain itu pula mengenai mekanisme beracaranya pun belum diatur secara baku dalam peraturan perUndang-Undangan khususnya dalam hal ini adalah Undang-Undang

²³ Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasundan, **Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Eksekusi Putusan Pidana**, Baslin Sinaga, 2017

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

perbankan yang bersifat pidana khusus. Berbeda halnya dalam hukum acara perdata yang menamai upaya hukum perlawanan pihak ketiga dengan istilah *Derden Verzet*.

Setelah banyaknya terjadi kasus serupa KSP Pandawa Mandiri Group dapat dipahami bahwa ketika suatu putusan pernyataan pailit telah ada dimana harta pailit menjadi barang bukti, kemudian terdapat suatu putusan pidana yang mana harta pailit itu disebutkan pada amar putusannya, barang bukti itu kemudian dirampas oleh negara, maka hal tersebut sangat merugikan para kreditor. Sehingga harus ada perlindungan hukum bagi kreditor tersebut.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶ Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁷ Apabila dilihat dari bentuknya, menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :²⁸

- a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan

²⁶ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

²⁷ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2

²⁸ Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20

perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :²⁹

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, yaitu pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan Hukum Preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 30

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dalam hukum perdata dikenal suatu bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan atas suatu putusan yang disebut *derden verzet*. Namun dalam hukum pidana belum dikenal istilah semacam itu atau masih dapat dikatakan belum merata penyebutan dan mekanisme beracaranya. Sehingga terdapat kekosongan peraturan apabila terjadi kasus semacam ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor sebagai pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pidana. Penulis berpendapat bahwa untuk mengisi kekosongan peraturan tersebut, perlawanan pihak ketiga yaitu *derden verzet* yang dikenal dan berlaku hanya dalam lingkup peradilan perkara perdata dapat diterapkan juga dalam peradilan perkara pidana yang menyerupai *derden verzet*. Karena secara yuridis belum diatur secara khusus sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan seperti dalam kasus para kreditor KSP Pandawa Group.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Status harta pailit dalam perkara KSP Pandawa Group adalah milik kreditor.

Berdasarkan adanya Putusan pernyataan pailit maka harta debitor yang menjadi harta pailit tidak lagi di bawah penguasaan debitor melainkan kurator. Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata harta debitor telah menjadi milik kreditor sebagai jaminan. Sehingga apabila ada putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan amar putusan merampas harta pailit itu, maka hal demikian dapat dipersamakan dengan merampas harta milik pihak ketiga yaitu kreditor.

2. Suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan amar putusan merampas barang yang telah menjadi harta pailit adalah tindakan merugikan pihak ketiga yaitu kreditor. Kreditor sebagai pihak ketiga membutuhkan perlindungan hukum agar haknya mendapatkan pembayaran tetap terlaksana melalui proses kepailitan. Dalam hukum perdata dikenal *derden verzet* sebagai upaya perlawanan pihak ketiga atas suatu putusan yang merugikan harta pihak ketiga yang hanya berlaku dalam perkara perdata saja. Namun dalam peradilan pidana belum ada keseragaman dan mekanisme yang jelas seperti *derden verzet* sehingga perlu

adanya suatu peraturan mengenai mekanisme yang menyerupai *derden verzet*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian penulis ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya perlu diadakan kordinasi antara kurator, jaksa, hakim pengawas dalam ranah pengadilan niaga dan hakim dalam ranah pidana untuk menetapkan barang bukti yang telah menjadi harta pailit dan mempertimbangkan putusan yang telah ada lebih dahulu terkait objek yang seperti harta pailit.
2. Perlu adanya peraturan perUndang-Undangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan dalam hal ini kreditor atas suatu putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anisa, Siti, **Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia**, Total Media, Yogyakarta: 2008.
- Amin, SM, **Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta**, Pradya Paramita, Jakarta: 1981.
- Asikin, Zainal, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia**, Pustaka Reka Cipta, Bandung: 2013.
- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno, **Hukum Perusahaan & Hukum Kepailitan**, Erlangga, Jakarta: 2012.
- Bernard Nainggolan, **Transparansi Dalam Pemberesan Boedel Pailit**, PT. Alumni, Bandung: 2015.
- Hadjon, Philipus M, **Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987.
- Harahap, M. Yahya, **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta: 2007.
- Harahap, M. Yahya, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta: 2007.
- Hartono, Sri Redjeki Hartono, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang: 2012.
- Henry Campbell Black, **Black's Law Dictionary Sixth edition**, West Publishing Co., St. Paul: 1990.
- Hoff, Jerry, **Indonesian Bankruptcy Law**, Tatanusa, Jakarta: 1999.
- Ibrahim, Johnny, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang: 2012.
- Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta: 2013.
- Kansil, C. S. T, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta: 1986.
- Lontoh, Rudy A, Kailimang, Denny & Ponto, Benny, **Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Penerbit alumni, Bandung: 2001.
- M, Hadi, **Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan**, Putra Grafika, Jakarta: 2008.

- Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta: 2006.
- Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2003.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, **Pedoman Menangani Perkara Kepailitan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003.
- Nating, Imran, **Edisi Revisi : Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004.
- Rahardjo, Satjipto, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.
- Shubhan, M. Hadi, **Hukum Kepailitan**, Prenadamedia Group, Jakarta: 2014.
- Sjahdeni, Sutan Remy, **Hukum Kepailitan**, Pusaka Utama Grafiti, Jakarta: 2010.
- Sinaga, Syamsudin M, **Hukum Kepailitan Indonesia**, PT. Tatanusa, Jakarta: 2012.
- Soeroso, R, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum**, PT. Tatanusa, Jakarta: 2012.
- Sutantio, Retnowulan, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan**, Mandar Maju, Bandung: 2005.
- Sutedi, Adrian, **Hukum Kepailitan**, Ghalia Indonesia, Bogor: 2009.
- Tim Pengajar, **Praktek Peradilan Perdata**, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado:2011.
- Usman, Rachmadi, **Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia**, Pradya Pramita, Jakarta: 1978.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, **Kepailitan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2000.

KAMUS

- Henry Campbell Black, **Black's Law Dictionary Sixth edition**, West Publishing Co., St. Paul: 1990.

KARYA TULIS

repository.ub.ac.id

Eliyana, **Makalah: Kapita Selekta Hukum Ekonomi Bisnis**, 2003

Mahkamah Agung RI , **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II**, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2007

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 40. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Peraturan Kepailitan (Faillissement Verordening) S. 1905-217 jo.S.1906-34

JURNAL

Siti Hapsah Isfardiyana, **Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pembersihan Harta Pailit**, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3, Bandung, 2016

Bendesa Made, **Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata**, Jurnal Rechtsens vol.3 Nomor 2, Jember, 2014

Baslin Sinaga, **Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Eksekusi Putusan Pidana**, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2017

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Niaga, Putusan Nomor 37/PDT.SUS-PKPU/2017/PN Pn. Jkt. Pst

repository.ub.ac.id

Pengadilan Negeri Depok, Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

INTERNET

<https://news.detik.com/berita/2192305/utang-ke-6480-investor-pt-qsar-digugat-pailit-ke-pengadilan-niaga> diakses pada tanggal 10 April 2018, Pukul 15.40.

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/12/11/pengadilan-vonis-bos-ksp-pandawa-15-tahun-penjara-dan-denda-rp-200-miliar> diakses pada tanggal 10 April 2018, Pukul 15.25.

http://arsip.ptamataram.go.id/syscontent/uploads/file/eDoc/Artikel/Artikel_Sarwohadi_2017-04-11_Penyelesaian_Derden_Verzet.pdf

